

Analisis Deskriptif tentang Urgensi Multikulturalisme dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Malang

Mohamad Febri Andika^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Malang, Indonesia

¹ mohamadandika45@guru.smk.belajar.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 September 2022;

Revised: 10 September 2022;

Accepted: 14 September 2022.

Kata-kata kunci:

Pendidikan Multikultural;

Pendidikan

Kewarganegaraan.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk dapat menggali dan mengkaji informasi mengenai implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah; 1) proses berlangsungnya pembelajaran PKn berbasis multikultural terlaksana melalui langkah: memilih topik dan materi yang dapat diintegrasikan dengan muatan pendidikan multikultural dengan menggunakan metode pembelajaran bersama. 2) Faktor pendukung dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural adalah siswa yang berlatar belakang berbeda-beda, materi yang menekankan pada kerukunan, media berupa audio visual, sumber belajar berupa buku teks, film yang bernuansakan multikulturalisme, evaluasi pembelajaran yang menekankan pada aspek kerjasama dan perilaku siswa. 3) Kendala dalam penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKn tidak terlihat signifikan akan tetapi perdebatan yang dilandasi oleh emosi sesaat dan faktor usia yang masih muda. 4) Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi, guru berperan lebih banyak untuk mengatasi perdebatan dan permasalahan yang muncul.

ABSTRACT

Keywords:

Student;

Academic Procrastination;

Peers.

Descriptive Analysis of the Urgency of Multiculturalism in Learning Citizenship Education at Vocational High School 8 Malang. The purpose of this study is to be able to explore and examine information regarding the implementation of multicultural education in learning Citizenship Education. This research method uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, documentation studies. The findings of this study are; 1) the ongoing process of multicultural-based Civics learning is carried out through the following steps: choosing topics and materials that can be integrated with multicultural education content using the joint learning method. 2) Supporting factors in multicultural-based Civics learning are students with different backgrounds, material that emphasizes harmony, media in the form of audio-visual, learning resources in the form of textbooks, films with nuances of multiculturalism, learning evaluations that emphasize aspects of cooperation and student behavior. 3) Obstacles in the implementation of multicultural education in Civics learning do not look significant, but the debate is based on momentary emotions and the factor of young age. 4) Efforts to overcome the obstacles faced, the teacher plays a greater role in overcoming debates and problems that arise.

Copyright © 2022 (Mohamad Febri Andika). All Right Reserved

How to Cite : Andika, M. F. (2022). Analisis Deskriptif tentang Urgensi Multikulturalisme dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Malang. *Didactica : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 38–45. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/didactica/article/view/1142>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Adanya legalitas dalam penyelenggaraan pendidikan telah melahirkan setiap daerah untuk mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pendidikan, karena dirasa sangat penting bagi masyarakat yang memungkinkan kemudahan bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Setiap satuan sekolah dapat menerima siswa dari kalangan manapun, yang kemudian menjadikan sekolah memiliki keberagaman dari berbagai aspek. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari perbedaan suku, agama, ras, adat dan latar belakang siswa (Dwintari, 2018).

Hal ini dapat kita pahami dikarenakan Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan yang tentu kemajemukan akan ditemukan di masyarakatnya, kemajemukan tersebut dibingkai dalam suatu kesatuan yang utuh yang merupakan identitas dan entitas dari bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai beragam suku, agama, ras, dan adat (budaya). Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna kemajemukan dijadikan satu di atas perbedaan yang ada di Indonesia (Maftuh, & Malihah E. (2020).

Seperti yang diungkapkan oleh Imam (2012), bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan budaya yang sangat beragam. Sekitar 200 juta penduduk yang tersebar kurang lebih dari 13.000 pulau. Wilayah Indonesia tersusun atas 33 propinsi, 440 kabupaten/kota, 5.263 kecamatan, serta 62.806 desa. Terdapat puluhan suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda, dan lebih dari 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia. Sejumlah 293.419 satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, total 51,3 juta siswa dan 3,31 juta guru.

Siswa akan merasakan sebuah kebersamaan, rasa persaudaraan, keharmonisan di antara mereka ketika memahami makna keberagaman (multikultur) itu sendiri. Pemahaman multikultur tidak hanya sebuah konsep belaka, akan tetapi multikultur harus dilakukan dengan nyata yang diintegrasikan oleh pemerintah yang berwenang dalam sebuah wadah, salah satunya pada lembaga Pendidikan. Pendidikan merupakan cara yang tepat untuk bisa memberikan pemahaman dan pengimplementasian dari konsep negara multikulturalisme dengan pendidikan berbasis multikultur. Seperti yang diungkapkan oleh Ainul Yakin (Kusmarni, 2012), bahwa: Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Lebih lanjut Ainul mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka.

H.A.R. Tilaar (Mahfud, 2011) mengatakan bahwa “pendidikan multikultural telah menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam membangun Indonesia Baru. Namun pendidikan berbasis multikultur ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai konsep dan praksis pelaksanaannya”. Masyarakat akan tercermin dari pendidikan, jika pendidikan itu baik akan menciptakan masyarakat yang baik (good citizen), akan tetapi jika pendidikan gagal maka akan menciptakan masyarakat yang gagal pula. Masyarakat yang gagal adalah masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai luhur dan berlaku amoral.

Masyarakat yang baik merupakan warisan berharga yang akan tetap menjaga negara Indonesia, dan memiliki kemauan untuk tetap bersatu di atas perbedaan bukan sebaliknya. Budimansyah dan Suryadi (2008:31) mengemukakan, bahwa : Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pendidikan kewarganegaraan yang berperan penting dalam pendidikan multikultural mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara kesatuan republik Indonesia.

Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti banyak, dan kultur yang berarti budaya, dan isme artinya aliran atau paham. Irwan (Mahfud, 2011) mengemukakan bahwa Multikulturalisme sebagai

sebuah paham yang menekankan pada kesedarajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan utama multikulturalisme adalah kesetaraan budaya. Pendapat lain diungkapkan oleh Naim & Sauqi (2010: 126) yang berpendapat, “multikulturalisme merupakan sebuah paham atau situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Multikulturalisme sering merupakan perasaan nyaman yang dibentuk oleh pengetahuan.”

Istilah multikulturalisme ini juga sering dipahami sebagai *plural society* yang diperkenalkan oleh JS Furnival. Menurut Furnival (Mahfud, 2011: 84) mengemukakan bahwa “masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal.” Masyarakat multikultural merupakan komunitas atau kelompok-kelompok yang secara kultural, ekonomi dan politik terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain merupakan suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan.

Dengan adanya pemahaman seperti itu, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Keberagaman di Indonesia saat ini belum dipahami oleh segenap warga masyarakat sebagai suatu *given*, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Andersen dan Crusher (Mahfud, 2011: 175) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai pengenalan dan pemahaman mengenai kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Pemikiran tersebut diungkapkan pula oleh Freire (Mahfud, 2011), “pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya.” Pendidikan, menurutnya harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. Pendidikan berbasis multikultur merupakan sebuah perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan yang kompleks dan beragam (plural) secara kultur. Pendidikan Indonesia sudah semestinya memberikan pendidikan yang mengedepankan sikap demoratis.

Tujuan dari pendidikan multikultural adalah untuk membentuk “Manusia Budaya” dan menciptakan “Masyarakat Berbudaya”. Tujuan dan fungsi dari pendidikan multikultural merupakan amanat dari tujuan dan fungsi pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yakni : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan Menurut Clive Black (Naim & Sauqi, 2010: 52-53) tujuan pendidikan multikultural adalah: a) *Teaching ethnic” student about their own ethnic culture, including perhaps, heritage language instruction; and b) Teaching all student about various tradisional cultures, at home and abroad. While such studies can be pursuit in a variety of ways, what is unsually missing is systematic treatment of fundamental issues of cultur and ethnicity; c) Promoting acceptance of ethnic diversity in society, d) Showing that people of differents religions, races, national background and so on are equal worth, d) Fostering full acceptance and equitable treatment of the etnic sub-cultures associated with different religions, race, national background, etc. in one’s own country and in other parts of the world; e) Helping student to works toward more adequate cultural form, for themselves and for society.*

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan multikultural membentuk manuswia berkeadaban dan mengajarkan nilai-nilai luhur dan juga nasionalisme. Sejalan dengan pendapat

tersebut, Pamela L. Tiedt dan Iris M. Tiedt (1990: 5) mengemukakan bahwa: “*As already state, the overall goal of multicultural education is world harmony, the understanding that will enable us to coexist in the world with diverse people. Without true understanding from all sides, we will inevitable have wars, more specifically, the primary aim of multicultural teaching is to develop awareness of all the people who make up the united state as human beings with smiliar need and aspirations*”. Tujuan dari pendidikan multikultural adalah menciptakan dunia yang harmonis, pemahaman akan adanya masyarakat yang berbeda di dunia. Tanpa pemahaman yang betul dari segala sisi, kita akan tak terelakan dari peperangan, lebih lanjut, tujuan utama dari pengajaran multikultural yaitu untuk mengembangkan kesadaran kepada semua orang dalam kehidupan bersama dengan persamaan keinginan dan cita-cita.

Untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan pendekatan dalam pembelajaran yang terintegrasi di semua disiplin ilmu terutama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Jams Bank (Mahfud, 2011) menjelaskan, bahwa pendidikan multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, *Content Integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, *The Knowledge Construction Process* yaitu upaya membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, *An Equity Paedagogy* yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya (culture) ataupun sosial (social). Keempat, *Prejudice Reduction*, maksudnya upaya mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pegajaran mereka. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif.

Dalam pembelajaran di persekolahan guru mengambil peran penting dan dominan dalam pentransformasian pengetahuan, dimana setiap guru akan mempunyai gaya mereka tersendiri, namun gaya demokratis akan lebih menggunakan kelas menjadi ruang demokrasi bagi siswa. Menurut Maulana (2008) bahwa melalui pendekatan demokratis ini, para guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus. Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Kemudian mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak sekedar berorientasi pada ranah kognitif, melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik sekaligus.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civics education*) merupakan konsep yang pada awal mulanya digunakan oleh bangsa Yunani, yang dikenal dengan istilah Civics, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *civicus* yang artinya penduduk dari sebuah kota. Wuryan, S. & Syaifullah (2009: 5) mengemukakan bahwa pelajaran civics mulai diperkenalkan pada tahun 1970 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika (*nation building*), sebab bangsa Amerika terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa ras, maupun etniknya. Usaha ini dikenal dengan “*Theory of Americanization*”.

Wuryan, S. & Syaifullah (2009: 5) mengemukakan, “pada mulanya pelajaran civics ini hanya membahas *government* atau pemerintahan saja, namun sejalan dengan perkembangan.” Masyarakat yang tidak puas dalam hal ini, muncul gerakan *community civic* pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W.A. Dunn. Maksud dari gerakan tersebut adalah agar civics lebih fungsional dalam menghadapi siswa pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan ruang lingkup lokal, nasional dan internasional.

Pengertian lain yang berbeda diungkapkan oleh Carter Van Good (Wuryan, S. & Syaifullah, 2009: 12) yakni civics adalah “*the element of political science ot that branch of political science dealing with*

the rights and duties of citizens”. Berdasarkan definisi tersebut civics merupakan bagian atau elemen dari ilmu politik atau cabang dari ilmu politik yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganegara.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa istilah civics merujuk pada sebuah konsep pembelajaran yang mengedepankan masalah pemerintahan dan pada awal mulanya pembelajaran civics di amerika bertujuan sebagai penanaman sikap nasionalisme bangsa Amerika yakni dengan mengamerikakan bangsa amerika (nation building). Dan juga sebuah pembelajaran mengenai hak dan kewajiban warga negara, namun istilah civics kemudian berganti dengan istilah civics education, seperti yang diungkapkan oleh Budimansyah & Suryadi (2008: 3) bahwa “masih pada tahun 1900- an, munculah istilah “civics Education” sebagai istilah baru, yang juga digunakan secara tukar-pakai dengan istilahh “citizenship education”. Dimana menurut Mahoney yang dikutip oleh Soemantri (Budimansyah & Suryadi, 2008: 3) bahwa “civics education merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik”.

Berkenaan dengan Civics Education, pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Branson (1999) yang mengemukakan bahwa“ Civics Education dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintah otonom (Self Government). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warganegara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri”.

Di Indonesia sendiri pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan juga pendidikan tinggi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada pasal 37. Dimana istilah dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berubah-ubah hal ini berkaitan dengan pemerintah dan kebijakan politik dari pemerintah itu sendiri yang mengharuskannya berganti-ganti.

Menurut kurikulum 1994 (Budimansyah & Suryadi, 2008: 11) mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai: “.mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa indonesia, nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat di wujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya bermuara untuk dapat menghasilkan luaran (Output) berupa peserta didik sebagai warganegara yang baik (good citizenship), yang meliputi pengetahuan akan hak dan kewajiban, serta baik secara karakter, etika, serta tanggung jawab dan demokratis (Hale, dkk., 2021).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Observasi merupakan suatu cara pengamatan langsung realita sosial yang berlangsung di lapangan untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa yang diteliti. Sugiyono, (2012) mengemukakan bahwa, “melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai observer nonpartisipan”. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara dengan pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Guba dan Lincoln (Basrowi & Suwandi, 2011) mendefinisikan dokumen dan record adalah sebagai berikut: Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan merupakan gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga menjadikan gambaran atau deskripsi objek tersebut jelas.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis multikultural di sekolah, merupakan tuntutan yang harus terus dikembangkan Sebagai penghargaan terhadap keberagaman dan menghargai berbagai keunikan yang ada. Hal ini berkaitan dengan fungsi sekolah yang memandang keberagaman siswa. Menurut narasumber, penerapan pembelajaran yang berbasis multikultur berjalan sejak awal berdirinya sekolah. Muatan tersebut menurutnya diintegrasikan pada semua mata pelajaran dengan menjalankan visi misi yang tentu siswa sebagai input sekolah yang beragam dari berbagai latar belakang Agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha (Syafe'i, 2017; Nugraha, 2020).

Narasumber berinisial KS menuturkan pula bahwa sekolah telah menyediakan fasilitas yang dapat menunjang terjadinya pembelajaran yang berbasis multikultural tersebut. Sekolah dalam menerima siswa tidak memandang mereka berasal dari mana dan atau latar belakang kebudayaan mereka bagaimana, pihak sekolah akan dengan senang hati menerima siswa dari berbagai latar belakang, dalam hal ini melihat dari segi Suku, Agama, Ras, Budaya dan Adat Siswa. Seperti yang diungkapkan pula oleh KS bahwa "sikap adil" harus terus dikembangkan dan diberlakukan kepada seluruh siswa. Walaupun menurut beliau memang di sekolah belum secara jelas menggunakan istilah Pendidikan Multikultural, akan tetapi mengambil ide pembauran tersebut sudah menggambarkan identitas pembelajaran yang berbasis multikultural (Prasetiawati, 2017).

Proses pembelajaran yang mengandung muatan multikultural dan pendidikan yang adil juga diungkapkan oleh narasumber lain, berinisial PKS bahwa dalam proses pembelajaran, berlangsung dengan adil dan tidak adanya pembatasan pendidikan antara satu dengan yang lainnya. Strategi lain yang dilakukan menurut PKS yakni dengan cara memberikan fasilitas guru agama dari setiap masing-masing agama yang berada di sekolah, dengan mengalihkan siswa yang non muslim ke sebuah kelas yang lain. Sekolah tidak menampilkan bahwa muslim merupakan agama dominan dalam setiap kelas, oleh karena itu mereka memberikan pengajaran lain sesuai dengan agamanya masing-masing agar tidak terjadi rasa tidak adil pada diri siswa.

Proses pengintegrasian pembelajaran multikultural juga menurut PKS dilaksanakan ketika hari-hari besar keagamaan seperti Sholat, Hari Raya Kurban, dan Hari Besar Agama lainnya. Dan siswa seolah-olah berbaur dengan kegiatan, namun tetap menurut beliau di hari besar tersebut walaupun siswa lain ikut bercampur namun tidak mengganggu dari inti substansi agama masing-masing. PKS juga menuturkan bahwa semua orang dapat melihat juga dari segi bangunan yang tidak spesifik menyediakan sebuah bangunan masjid seperti kebanyakan sekolah lain, akan tetapi menyediakan tempat dan ruang-ruangan untuk beribadah. Faktor pendukung lain yakni kegiatan ekstra kurikuler yang menunjang tidak adanya pembatasan atau ekstra kulikuler yang tertutup untuk siswa tertentu, akan tetapi ketika siswa itu mendaftar di ekstra kulikuler tersebut mereka akan menerimanya dan bebas tidak terpaut latar belakang (Wibowo, & Wahono, 2017).

Dengan begitu, para siswa yang memiliki keberagaman akan menjadikan kelasnya sebagai tempat pembelajaran untuk bagaimana menghargai dan menghormati keberadaan yang lain, dan sebagai peredam konflik yang bernuansakan kultural. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber ketiga, berinisial SWI bahwa dalam memulai pelajaran PKN mereka mendengarkan ibadah pagi berupa cerita motivasi yang kemudian dilanjutkan do'a, yang ditujukan kepada seluruh kelas dan diperdengarkan melalui pengeras suara. Doa pagi yang diperdengarkan tersebut untuk dapat menanamkan keadilan dan juga kebersamaan agar siswa terbiasa untuk mengaplikasikannya dimanapun.

Oleh karena itu, pembelajaran yang berbasis multikultural dirasa efektif untuk saling mengurangi prasangka buruk terhadap golongan yang lain. Hal ini sejalan dengan penuturan SWI bahwa Ketika pembelajaran PKn berlangsung suasana belajar yang nyaman tidak ada rasisme atau yang lainnya di kelas, pembelajaran berlangsung dirasa menyenangkan karena siswa dibiasakan untuk saling menghormati. Ketika pembelajaran di kelas mereka juga diberikan pemahaman untuk menghormati seperti yang diungkapkan oleh guru “saling menghormati”, yakni guru memberikan pemahaman untuk memberikan hak yang sama dengan yang lainnya misalkan dalam persamaan hak untuk berbicara sehingga yang dirasakan suasana dalam kelas adalah demokratis.

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan nampak bahwa implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada sikap toleransi, adil, dan sikap saling menghormati terhadap seluruh civitas akademika. Pendidikan multikultural tersebut sebagai muatan yang tidak tercantum dalam kurikulum sekolah secara jelas, akan tetapi sebagai penunjang dalam mencapai tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Referensi

- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta 2 Nomor 2.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dwintari, J. W. (2018). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2(1).
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1 (12).
- Kusmarni, Y. (2008). Pendidikan Multikultural Suatu Kajian Tentang Pendidikan Alternatif Di Indonesia Untuk Merekatkan Kembali Nilai-Nilai Persatuan, Kesatuan Dan Berbangsa Di Era Global.
- L. Tiedt, P dan M. Tiedt, I. (1990). *Multicultural Teaching*. United State: Allyn and Bacon A Division of Simon & Schuster, Inc.
- Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Pendidikan Multikulturalisme Menjadi Resolusi: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(2).
- Mahfud, C. (2011). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Naim, N. dan Sauqi, A. (2010). Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Medi Group
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197-210.
- Nugraha, D. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140-149.
- Prasatiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02), 272-303.
- Purnama, S. (2021). Implementasi Pendidikan Multikultural melalui Mata Pelajaran PPKn untuk Mendukung Sikap Toleransi Siswa dalam Masyarakat Multikultur. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5753-5760.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Syafe'i, I. (2017). Model Kurikulum Pesantren Salafiyah dalam Perspektif Multikultural. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 127-143.
- Utami, P. S. (2019). Analisis Internalisasi Pendidikan Multikultural Pada Pembelajaran Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Prodi Ppkn Unmuh Ponorogo Tahun 2018). *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 10-17.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Civics*, 14(2), 196-205.

Wihardit, K. (2010). Pendidikan multikultural: suatu konsep, pendekatan dan solusi. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 96-105.